

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dalam pelaksanaan demokratisasi di Indonesia kehadiran partai politik menjadi salah satu yang sangat penting. Partai politik pada dasarnya adalah suprastruktur yang harus dimiliki sebuah sistem pemerintahan agar dapat dikatakan sebagai sistem pemerintahan yang demokratis.<sup>1</sup> Dilihat dari partai politik yang memberikan kemudahan pada sistem demokrasi dalam menghasilkan pemimpin yang baik dan berintegritas melalui pelaksanaan pemilu dalam pemerintahan suatu negara. Partai politik di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak masa penjajahan Belanda, namun maraknya pendirian partai politik terlihat beberapa bulan setelah kemerdekaan Indonesia. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah partai politik Indonesia pasca-reformasi, yang menjadi cikal bakal dari perubahan besar dalam dunia perpolitikan Indonesia, perubahan yang terjadi dari sistem otoritarian ke sistem politik demokratis ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang Multi-partai.

Sigmund Neuman ahli ilmu klasik dan kontemporer melihat partai politik sebagai organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha menguasai kekuasaan

---

<sup>1</sup> Muhammad Ridha Dalam Wessy Juni Saputri. 2021. Pelembagaan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Padang Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019. *Skripsi*. Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang

pemerintahan serta memperebutkan dukungan rakyat melalui persaingan dengan golongan-golongan lain yang memiliki pandangan yang berbeda.<sup>2</sup> Miriam Budiardjo mendefinisikan partai politik sebagai suatu kelompok yang terorganisir dengan anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Kelompok ini memiliki tujuan untuk memperoleh kekuasaan dan merebut kedudukan politik melalui cara yang konstitusional (pemilu) dalam upaya melaksanakan programnya. Dengan begitu partai politik sebagai wadah bagi individu atau kelompok untuk masuk dalam lingkup politik dengan fungsi sebagai penyambung antara pemerintah dan rakyatnya. Secara jelas keberadaan partai politik ini telah memberikan ruang bagi rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Namun akhir-akhir ini partai politik dihadapkan dengan kondisi yang paradoksal, dimana dalam sistem demokrasi, partai politik menjadi salah satu tolak ukur pelaksanaannya, namun dilain sisi kepercayaan publik terhadap partai politik terus menunjukkan penurunan. Demikian survei yang dilakukan beberapa tahun belakang memperlihatkan bahwa partai politik masih menjadi salah satu dari dua lembaga terbawah yang dipercayai publik. Hasil sigi Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 25-31 Januari 2021, yang melibatkan 1.200 responden dengan wawancara tatap muka, menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan partai politik dalam dua posisi terbawah lembaga yang dipercaya publik, yaitu sebanyak 71 persen responden menyatakan percaya kepada DPR dan 65 persen yang percaya kepada partai politik. Hal senada juga terlihat dari hasil survei Indikator Politik Indonesia yang terlaksana pada 1-3 Februari 2021,

---

<sup>2</sup> Sigmund Neumann dalam Meriam Budiardjo. 2010. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: *PT Gramedia Pustaka Utama*

menunjukkan tingkat kepercayaan publik kepada parpol berada di urutan yang mengkhawatirkan, yaitu sebesar 47 persen.<sup>3</sup>

Kondisi ini disebabkan oleh partai-partai politik yang belum mampu memerankan fungsinya dengan baik, maraknya kasus korupsi yang melibatkan kader partai, dan menurunnya kepedulian partai terhadap kepentingan rakyat. Padahal partai politik dan demokrasi merupakan hal yang saling berhubungan dan saling berkaitan erat. Demokrasi tanpa partai politik tidak akan dapat terlaksana dengan baik, begitupun sebaliknya. Bahkan kualitas demokrasi tergantung pada kualitas partai politiknya, kualitas suatu partai politik juga berhubungan kuat dengan proses pelebagaan. Dalam hal tersebut, upaya untuk meninjau proses pelebagaan partai politik adalah bagian dari upaya memastikan demokrasi diisi oleh partai politik yang berkualitas.<sup>4</sup>

Pelebagaan partai politik merupakan proses pematapan partai politik baik dalam wujud perilaku yang memola maupun dalam sikap atau budaya, sehingga partai menjadi lebih dari sekedar organisasi (*the process by which the party becomes established in terms of both of integrated patterns of behaviour and of attitude or culture*).<sup>5</sup> Dari pelebagaan politik dapat dianalisis model dan ciri khas dari masing-masing partai politik. Menurut Randall dan Lars di dalam teori pelebagaan partai politik, terdapat empat aspek yang menentukan bagaimana sebuah partai politik dapat dilihat dan dianalisis pelebagaan

---

<sup>3</sup> Tempo.co, 2022. Survei LSI Soal Kepercayaan Publik: DPR dan Parpol Urutan Paling Buncit. <https://nasional.tempo.co/read/1435647/survei-lsi-soal-kepercayaan-publik-dpr-dan-parpol-urutan-paling-buncit>. (diakses pada 21 Maret 2022)

<sup>4</sup> Randall Dan Lars Dalam Nanang Suryani, Dkk. 2020. Pelebagaan Partai Politik: Studi Pada Partai Solidaritas Indonesia Kota Bandung Tahun 2019. *Jurnal Civic Hukum*. Volume 5, No. 1, P-Issn 2443-1591

<sup>5</sup> Randal dan Lars. 2002. Party Institutionalisation in New Democracies. *Jurnal Party Politics*, Vol 8 (1) 5-29

politiknya, yaitu: 1) dimensi kesisteman (*systemness*), 2) dimensi identitas nilai (*value infusion*), 3) dimensi otonomi dalam pengambilan keputusan (*decisional autonomy*), 4) dimensi pengetahuan atau citra publik (*reification*).<sup>6</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, dikatakan bahwa partai politik yang terlembaga dengan baik akan mampu menang dalam pemilu, maka peneliti ingin melihat fenomena bagaimana empat aspek pelebagaan politik ini mempengaruhi tingkat eksistensi sebuah partai politik dalam memenangkan pemilu. Sehingga fokus penelitian ini akan melihat bagaimana pelebagaan politik PDI-Perjuangan di Sumatera Barat periode 2019-2022. Karena dilihat bahwa PDI-Perjuangan dalam empat kali pelaksanaan pemilu di Sumatera Barat, masih belum mampu untuk mengambil simpati masyarakat Sumatera Barat dalam upaya memenangkan pemilu di wilayah ini.

## 1.2. Rumusan Masalah

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) yang sebelumnya adalah Partai Demokrasi Indonesia (PDI) merupakan salah satu partai politik di Indonesia yang diresmikan pada Tahun 1998, Partai dengan lambang Banteng yang bermoncong putih ini merupakan kelanjutan dari PNI yang diwariskan oleh Soekarno. Pada Tahun 1996 konflik internal yang terjadi dalam tubuh PDI menjadikan partai ini terdiri dari dua kubu, yaitu PDI kubu Soerjadi dan PDI kubu Megawati yang kini dikenal sebagai PDI-Perjuangan.<sup>7</sup> *Life history*

<sup>6</sup> Stefany Debora. Pelebagaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Pdi Perjuangan): Studi Kasus Kandidasi Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Malang Tahun 2013

<sup>7</sup> "PDI merupakan partai politik di Indonesia yang berdiri tahun 1973, kemunculan partai ini didasarkan adanya kebijakan penyederhanaan partai politik menjadi tiga golongan, yaitu golongan karya, golongan spiritual dan golongan nasionalis. Peristiwa ini menyebabkan munculnya partai-partai politik yang berfusi, sehingga PDI merupakan hasil dari kebijakan fusi lima partai politik, diantaranya PNI, Parkindo, Partai Murba, PKRI, dan IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan

yang membentuk PDI-Pejuangan menjadikannya tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat muslim di Indonesia, hal ini disebabkan oleh partai politik yang berfusi dalam membentuk PDI-Perjuangan merupakan partai yang berbasis kebangsaan, nasionalisme serta keagamaan (non-islam). Tidak mengherankan jika masyarakat muslim Indonesia seringkali beranggapan bahwa PDI-Perjuangan sebagai partai yang didominasi oleh non-muslim, pelabelan pada partai ini bukan tanpa sebab, melainkan juga terlihat dari rekam jejak pertumbuhan dan perkembangan partai yang sejak pembentukannya tampak setia pada sikap tradisionalnya, mengabaikan dan tampak menjauh, serta tidak peduli pada kegiatan keagamaan umat muslim. Itulah mengapa dukungan masyarakat muslim Indonesia terhadap PDI-Perjuangan sangat rendah.

Sumatera Barat merupakan daerah dengan penduduk mayoritas beragama islam, menjunjung tinggi adat dan budaya, dengan selalu berpaut pada slogan “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah” yang berarti menjalankan adat berdasarkan pada syariat, dan syariat berpedoman pada kitabullah (Al-Qur’an). Masyarakat Sumatera Barat adalah masyarakat yang sangat memegang kuat kultur

---

Indonesia). PDI-Perjuangan yang sebelumnya disebut sebagai PDI, terbentuk setelah terjadinya konflik dalam tubuh PDI pada tahun 1996 yang menyebabkan partai ini terdiri dari dua kubu, yaitu PDI kubu Soerjadi dan PDI kubu Megawati. Namun partai politik yang diakui oleh pemerintah adalah PDI kubu Soerjadi, sehingga PDI kubu Megawati tidak dapat mengikuti Pemilu pada tahun 1999. PDI-Perjuangan adalah partai politik yang kehadirannya tidak diinginkan namun tidak dapat dihindari, perebutan kekuasaan yang terus terjadi di internal PDI membuat partai ini sulit untuk diakui oleh pemerintah, meskipun yang memegang kekuasaan dalam pemerintahan telah berganti, namun tetap saja yang diakui oleh pemerintah adalah PDI Soerjadi. Dalam mengakali hal tersebut pada bulan Oktober tahun 1998 PDI yang dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri menyelenggarakan kongres V di Denpasar Bali, dengan mengubah nama PDI menjadi PDI Perjuangan serta mengangkat Megawati sebagai Dewan Pimpinan Pusat PDI-Perjuangan 1998-2003. Perjuangan partai politik PDI-Perjuangan untuk diakui dan dapat mengikuti pemilu pada tahun 1999 membuahkan hasil yang baik, sehingga partai ini mampu mengikuti empat kali pemilu di Indonesia hingga saat ini.” Uldan Tajri. 2016. Pergulatan PDI-Perjuangan Sebagai Partai Ideologis Di Indonesia (Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Pergulatan PDI-Perjuangan Dari Pragmatis Ke 1 Juni). *Skripsi*. Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “Apmd” Yogyakarta.



dan tradisi mereka, mereka juga memiliki cara pandang sendiri dalam merespon perubahan zaman, termasuk dalam merespon kebijakan dan politik yang diperankan oleh negara. Sikap yang sangat berpegang kuat pada adat dan agama menjadikan masyarakat Sumatera Barat sebagai pemilih yang kritis dalam menentukan pilihannya, sehingga membuat elektabilitas PDI-Perjuangan di Sumatera Barat dipertanyakan.

Elektabilitas PDI Perjuangan di Sumatera Barat juga dapat ditelisik pada kekecewaan masyarakat Sumatera Barat terhadap pemerintahan pusat pada masa kepemimpinan Soekarno, yang mana adanya penumpasan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) melalui operasi militer di Sumatera Barat, sehingga masyarakat merasa bahwa tentara negara yang mereka pertahankan pada masa revolusi nyatanya menyerbu tanah kelahiran mereka. Rasa dikhianati oleh negara sendiri menimbulkan kekecewaan dan pemberontakan yang hingga kini masih berimplikasi pada pandangan masyarakat Sumatera Barat akan partai politik PDI-Perjuangan yang merupakan representasi dari Soekarno.<sup>8</sup> Ketua umum PDI-Perjuangan juga menyampaikan bahwa beliau merasa heran mengapa sampai sekarang masyarakat Sumatera Barat tidak menyukai partai yang dipimpin olehnya. “seperti saya melihat Sumatera Barat, saya pikir kenapa ya rakyat Sumbar itu sepertinya belum menyukai PDIP?”<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Audrey Kahin. 2008. *Dari Pemberontakan ke Integrasi, Sumatra Barat dan Politik Indonesia 1926-1998*. Yayasan Obor Indonesia, anggota IKAPI DKI Jakarta.

<sup>9</sup> Tirto.id, 2020. Mengapa PDIP Tak Laku di Sumbar Sejak Dulu & Bikin Megawati Bingung. <https://tirto.id/mengapa-pdip-tak-laku-di-sumbar-sejak-dulu-bikin-megawati-bingung-f3wh>.(diakses pada 02 Februari 2022)

Berdasarkan pernyataan yang dilontarkan oleh ketua umum partai politik PDI-Perjuangan tersebut memperlihatkan bahwa bagaimana elektabilitas partai ini di Sumatera Barat. Pernyataan tersebut juga menggambarkan bahwa citra publik yang dimiliki PDI-Perjuangan di daerah ini mengalami masalah. Dikatakan oleh Randall dan Lars, dalam melihat pelebagaan partai politik itu terdapat empat dimensi, yaitu 1) dimensi kesisteman (*systemness*), 2) dimensi identitas nilai (*value infusion*), 3) dimensi otonomi dalam pengambilan keputusan (*decisional autonomy*), 4) dimensi pengetahuan atau citra publik (*reification*). Berdasarkan hal tersebut, jelas terlihat bahwa PDI-Perjuangan di Sumatera Barat memiliki masalah pada salah satu dimensi pelebagaannya, yaitu padadimensi citra publik. Randall dan Lars menyebutkan bahwa citra publik suatu partai politik berkaitan dengan bagaimana partai politik membangun serta menjaga image baiknya didepan publik, sehingga partai politik dapat diterima dan dipercaya oleh publik. Akan tetapi, jika melihat pada kebingungan Megawati terkait rasa tidak suka masyarakat terhadap partainya jelas menunjukkan bahwa partai PDI-Perjuangan yang dipimpin olehnya memiliki masalah pada citra publiknya.

Adanya masalah dalam pelebagaan partai PDI-Perjuangan pada dimensi citra publik (*reification*) ini, membuat peneliti yakin bahwa adanya masalah dalam proses pelebagaan lainnya. Sebab, empat dimensi pelebagaan partai yang disebutkan oleh Randall dan Lars ini saling berkaitan erat, dimana dimensi derajat kesisteman (*systemness*) yang mengatur bagaimana penggunaan ideologi/platform, fungsi partai politik juga membahas bagaimana asal usul partai ini, akan berdampak pada dimensi identitas nilai (*value infusion*) suatu partai. Karena identitas nilai yang akan ditonjolkan oleh partai ditengah-tengah

masyarakat sesuai dengan apa yang telah diatur sebelumnya dalam derajat kesisteman. Selanjutnya, bagaimana pengaplikasian identitas nilai ini nantinya akan mempengaruhi bagaimana partai dalam mengambil dan menentukan keputusan (*decisional autonomy*) dalam partai berdasarkan atas identitas yang telah dimiliki ditengah masyarakat. Pada akhirnya cara partai dalam mengatur kesisteman, menonjolkan identitas nilainya, otonomi pengambilan keputusan dalam partai akan berpengaruh pada bagaimana citra (*reification*) yang terbangun ditengah-tengah masyarakat nantinya , sehingga partai dapat diterima dan dipercaya oleh publik. Hal ini kemudian membuat peneliti percaya bahwa pasti adanya masalah dalam proses pelembagaan partai politik PDI-Perjuangan di Sumatera Barat.

Kecurigaan peneliti akan masalah dalam pelembagaan partai politik PDI-Perjuangan di Sumatera Barat ini juga diperkuat oleh hasil survei dari salah satu lembaga riset dan konsultan Spektrum Politika bahwasanya elit dari PDI-Perjuanganlah yang tidak mau mendekatkan diri kepada masyarakat Sumatera Barat. Merujuk pada hasil survei tersebut, yang menemukan tujuh faktor penyebab elektabilitas PDI-Perjuangan di Sumatera Barat masih rendah. Diantaranya adalah pertama, bahwa aktor-aktor PDI-Perjuangan kurang mendekatkan diri kepada masyarakat Sumatera Barat. Tentunya masalah ini bersumber dari pelembagaan politiknya, dimana setiap pengorganisasian yang salah satu bagiannya adalah komunikasi politik dalam membangun citra publik merupakan bagian dari proses pelembagaan politik, hal inilah yang mampu mempengaruhi rendahnya dukungan yang diperoleh oleh suatu partai politik.

Kedua, Lemahnya figur PDI-Perjuangan di Sumatera Barat, terbukti 62 persen masyarakat tidak mengenal bahkan tidak mengetahui bahwa adanya tokoh



lokal yang berasal dari PDI-Perjuangan. Ketiga, aktifitas politik PDI-Perjuangan tidak sesuai dengan keyakinan masyarakat Sumatera Barat, dengan 60,3 persen masyarakat Sumatera Barat merasa bahwa setiap program yang dilakukan oleh PDI-Perjuangan tidak senada dengan keyakinan masyarakat disana. Sehingga masyarakat Sumatera Barat dengan mayoritas Islam merasa tidak terwakilkan dengan partai ini. Keempat, elit PDI-Perjuangan dinilai bersikap arogansi di tingkat pusat, terbukti 58,1 persen masyarakat Sumatera Barat menilai bahwa elit PDI-Perjuangan cenderung bersikap arogansi, yang ditunjukkan elit PDI-Perjuangan terhadap publik. Kelima, pemberitaan mengenai sikap PDI-Perjuangan baik yang bersumber dari pemberitaan melalui media cetak maupun media online tidak sesuai dengan keinginan masyarakat Sumatera Barat. Kemudian keenam, gagasan, sikap dan perilaku dari elit PDI-Perjuangan tingkat pusat dinilai bermasalah. Ketujuh, PDI-Perjuangan peduli dengan pluralisme namun abai akan kepentingan umat Islam.

Berdasarkan dari penjelasan sebelumnya, jika dilihat dari empat dimensi pelembagaan politik yang dikemukakan oleh Randall dan Lars, dapat dinilai bahwa partai politik PDI-Perjuangan lebih memiliki masalah pada dimensi citra publik (Reification). Reification terhadap partai politik berhubungan dengan pengetahuan publik terhadap partai politik tersebut, jika merujuk pada pertanyaan apakah keberadaan partai politik tersebut telah diketahui publik, jawabannya adalah ya, karena tidak sedikit dari masyarakat Sumatera Barat yang telah mengetahui keberadaan PDI-Perjuangan ini. Akan tetapi, jika pertanyaannya apakah keberadaan partai politik ini telah tertanam pada imajinasi masyarakat Sumatera Barat, jawabannya adalah tidak. Karena apabila suatu partai politik telah

tertanam dalam imajinasi masyarakat, maka mereka akan menyesuaikan baik harapan, aspirasi maupun sikap dan perilaku mereka terhadap keberadaan partai politik ini. Sehingga yang menjadi masalahnya disini adalah pengetahuan masyarakat Sumatera Barat akan aktor-aktor PDI-Perjuangan sangat minim, serta citra publik yang selalu diperankan oleh PDI Perjuangan cenderung dinilai tidak sejalan dengan keinginan masyarakat Sumatera Barat.

Rendahnya dukungan masyarakat Sumatera Barat terhadap PDI-Perjuangan terlihat tidak hanya dari perolehan suara satu atau dua pelaksanaan pemilu saja, namun sudah terlihat dari awal berdirinya partai hingga saat ini. Hal ini terlihat dari kekalahan yang dialami dan perolehan suara yang didapat PDI-Perjuangan di Sumatera Barat dalam beberapa pemilu di Indonesia. Untuk melihat lebih jelasnya, perhatikan tabel berikut.

**Tabel 1.1**  
**Perolehan Suara PDI-P di Sumatera Barat**  
**Dalam Pemilu Tahun 2004-2019**

Tahun	Jumlah Dapil	Jumlah Suara	Persentase
2004	5	8.889	7%
2009	5	11.789	9%
2014	8	34.119	25%
2019	8	13.488	10%

*Sumber: Data Sekunder Kpu Provinsi Sumatera Barat di olah oleh peneliti tahun 2022*

Berdasarkan tabel tersebut, dari pemilu Tahun 2004 sampai 2019 menunjukkan bahwa masih lemahnya daya tarik PDI-Perjuangan di Sumatera Barat. terhitung sejak berdirinya partai menuju pemilu 2004, PDI-Perjuangan

masih belum mampu mendapatkan lebih dari empat kursi di DPRD Provinsi ini. Lemahnya elektabilitas PDI-Perjuangan di Sumatera Barat tidak hanya berpengaruh pada perolehan kursi di Provinsi ini saja, tetapi juga berpengaruh pada perolehan kursi di Pusat yang mewakili Sumatera Barat.

**Tabel 1.2**  
**Perolehan Kursi PDI-P di DPRD Sumatera Barat**  
**Tahun 2004-2019**

No	Pemilu Tahun	Perolehan Kursi	
		DPRD Sumbar	DPR RI
1.	2004	4	0
2.	2009	3	0
3.	2014	4	2
4.	2019	3	0

*Sumber: diolah oleh peneliti tahun 2022*

Meskipun begitu, pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur Tahun 2005 PDI-Perjuangan mampu keluar sebagai pemenang di Sumatera Barat, pada saat itu PDI-Perjuangan yang berkoalisi dengan Partai Bulan Bintang (PBB) mengusung pasangan calon Gamawan Fauzi-Marlis Rahman. Kemudian jika dilihat dari tingkat Kabupaten/Kota, PDI-Perjuangan kembali berhasil menempatkan kadernya sebagai pemenang, yaitu Sutan Riska Tuanku Kerajaan sebagai Bupati Dhamasraya pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015<sup>10</sup>. Berdasarkan fenomena

<sup>10</sup> Jawapos.com. PDIP Pernah Menang di Pilgub Sumbar, 2005 Usung Gamawan Fauzi. <https://www.jawapos.com/nasional/politik/08/09/2020/pdip-pernah-menang-di-pilgub-sumbar-2005-usung-gamawan-fauzi/> diakses pada 02 Juli 2022

ini, dapat dikatakan bahwa pemenang pemilu tidak bisa disimpulkan sebagai partai yang secara institusi merupakan partai yang paling baik dan terlembaga. Karena partai yang secara institusi bermasalah bukan tidak mungkin untuk dapat menang dalam pemilu, sebaliknya partai yang terlembaga dengan baik, yang mampu memenuhi kriteria partai politik modern yang demokratis belum tentu menang dalam pemilu.

Berdasarkan dari fenomena ini, peneliti mengasumsikan bahwa eksistensi partai politik di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh pelebagaan politik yang baik, namun partai politik PDI-Perjuangan di Sumatera Barat dari pemilu Tahun 2004 sampai pada pemilu Tahun 2019 masih belum begitu kuat di wilayah ini. Berdasarkan hal tersebut tentu saja terdapat masalah-masalah dalam pelebagaan politik partai ini yang mempengaruhi elektabilitasnya di Sumatera Barat, baik dilihat dari ideologi pembentukan partai hingga kemampuan partai dalam mengorganisasikan partainya pada wilayah ini. Kemampuan partai politik dalam mengambil simpati masyarakat serta menciptakan citra partai yang baik dimata publik sangat mempengaruhi keberhasilan partai dalam pemilu. Namun, meskipun partai PDI-Perjuangan sangat eksis di pulau Jawa dan wilayah lainnya, PDI-Perjuangan nyatanya masih belum mampu untuk mendapatkan simpati di tingkat pusat dari masyarakat Sumatera Barat hingga saat ini. Sehingga berdasarkan fenomena tersebut, maka yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah Bagaimana permasalahan pada pelebagaan politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Provinsi Sumatra Barat periode 2019-2022?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah

- 1) Menganalisis tentang pelebagaan politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Di Provinsi Sumatera Barat Periode 2019-2022
- 2) Untuk menganalisis permasalahan pelebagaan politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Provinsi Sumatera Barat Periode 2019-2022

### 1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara Akademis

Secara akademis, peneliti mengharapkan penelitian ini memberikan kontribusi dan kebaruan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan ilmu pelebagaan partai politik pada Jurusan Ilmu Politik Universitas Andalas. Serta penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan lanjutan penelitian dalam melakukan penelitian selanjutnya dengan tema yang sama namun pada objek yang berbeda.

2. Secara Praktis

Secara praktis, peneliti mengharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan serta masukan bagi partai politik khususnya PDI-Perjuangan dalam memperbaiki sistem pelebagaan politik agar dapat diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia khususnya Sumatera



Barat, mengingat partai politik sebagai suatu unsur yang sangat penting dalam sistem demokrasi.

